



## **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

#### 3.1 Capaian Kinerja 2017

#### 2.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran 2017

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu program & kegiatan yang

dilaksanakan dalam pencapaian visi misi suatu organisasi atau visi misi Kepala Daerah. Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah di-tetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja maupun Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD. Agar pencapaian sasaran – sasaran tersebut dapat lebih terukur maka dituangkan ke dalam indikator – indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran – sasaran tersebut dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : cukup
- Nilai >80 s/d 95 : baik
- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana uraian berikut ini:

Misi Pertama ***"Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mapu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat"***

Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi pertama yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- b. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Kedua sasaran strategis tersebut diwakili dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu a). Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, d). Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Selain dua sasaran tersebut di atas, terdapat 3 ukuran yang dipergunakan untuk menginterpretasikan kinerja Perencanaan sebagaimana yang terdapat di dalam Bab IV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016-2021, yaitu :

- a. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator kinerja yang dipergunakan yaitu *cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif*;
- b. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja yang dipergunakan yaitu *cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan*;
- c. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja yang dipergunakan yaitu *cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas*.

Ke lima sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja menjadi ukuran yang dipergunakan untuk merepresentasikan keberhasilan kinerja Perencanaan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Perjanjian kinerja antara Walikota dengan Kepala OPD sebagai penerima amanah sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan : a). sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b). menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c). sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d). sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; e). sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut ditampilkan capaian indikator sasaran dan hasil pengukuran untuk keempat indikator tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
<b>MISI I :</b> <i>Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>					
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja  b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90%  60%	90.41%  94.75%	100.46%  157.92%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60%	70.19%	116.98%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58.62%	58.62%	100%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	51.25%	58.17%	113.50%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	100%	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	70%	73.11%	104.44%

Kinerja perencanaan pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang meningkat apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, ke semuanya mencapai target yang di perjanjikan bahkan capaian kinerjanya melebihi 100%. Kinerja ini semakin menambah semangat aparatur perencana untuk senantiasa meningkatkan kinerja perencanaan untuk lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Analisis terhadap hasil capaian indikator sasaran tersebut di atas sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis Terwujudnya daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel**

Di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004, dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah, terdapat 5 (lima) pendekatan proses perencanaan antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu 1).pendekatan *teknokratis*; 2).pendekatan *top down (atas-bawah)*; 3). *bawah-atas (bottom up)*; 4).*partisipatif* dan 5). pendekatan politis.

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, terdapat beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dikenal beberapa pendekatan proses perencanaan antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan top down/bottom up serta pendekatan politis

Perencanaan partisipatif adalah sebagaimana penjelasan di dalam Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi masyarakat ini adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sehingga muncul aspirasi dan rasa memiliki terhadap apa yang di rencanakan. Perencanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan dan begitu pula sebaliknya.

Pendekatan partisipatif memiliki proporsi strategis mengingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangat menentukan. Semakin kritis dan partisipatif masyarakat kota terlibat dalam perencanaan mengindikasikan semakin baik pembangunan. Hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat dan akuntabel agar pengambilan keputusan perencanaan dan kebijakan daerah dan kebijakan daerah akan berjalan dengan baik dan berkualitas.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu :

a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

Indikator capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja mempunyai indikator kinerja Total target sasaran terlaksana/jumlah target sasaran perencanaan pembangunan di kalikan 100%

Dilihat dari indikator kinerja sasaran Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Capaian kinerja ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah mencapai 85%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016. Adapun relaisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar **90.41%** atau dengan capaian sebesar **100.46%**.



Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah



e-aspiration

**Gambar 3.1 Screenshot Sistem Perencanaan Daerah Kota Magelang (SIPPD)**

Data pada tahun 2017 dari 73 indikator sasaran yang di amanatkan terdapat 66 inidkator yang tercapai. Apabila di dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2016 maka kinerja pada tahun ini lebih baik. Realisasi pada tahun 2016 dari 70 indikator sasaran yang diamanatkan pada tahun 2016 sebanyak 62 sasaran telah mencapai target. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke dapan antara lain:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 ataupun Permendagri 86 Tahun 2017, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut masih bisa belum secara optimal dapat terwujud.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal
4. Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.



Solusi atas kendala dilakukan melalui:

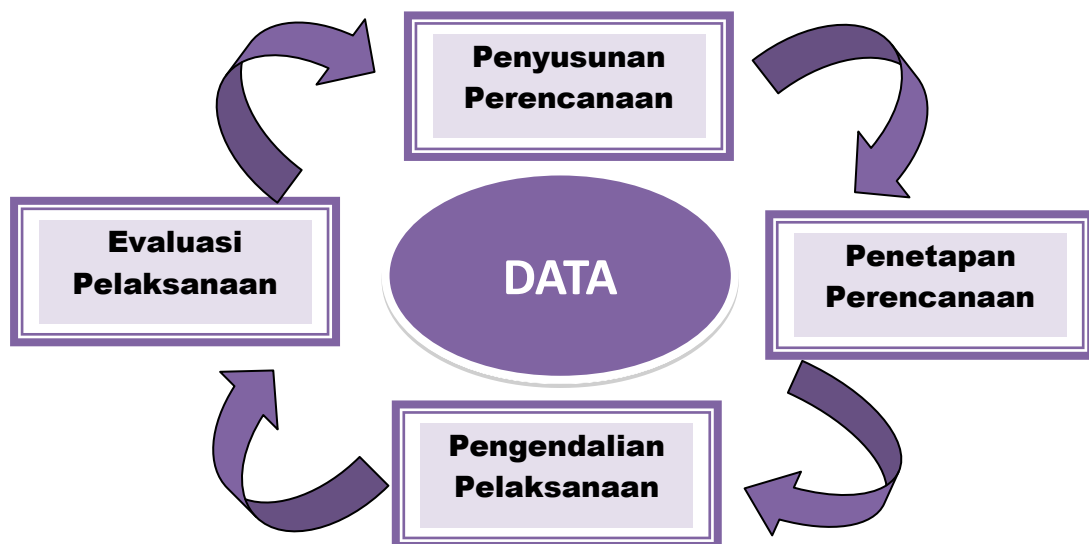
1. Peningkatan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diwujudkan pada saat penyusunan Rancangan Awal sehingga dapat diintegrasikan lebih dini dalam perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi lebih intensif antara Bappeda, Setwan dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut.
2. Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini, di level eksekutif integrasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu didorong secara penuh untuk pengintegrasian. Komunikasi intensif dengan DPRD juga layak diupayakan.
3. Peningkatan pemahaman di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar SKPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD.
4. Peningkatan kualitas dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan.
5. Peningkatan capacity building di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan RKPD. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
6. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
7. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada

b. *Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektorial yang di manfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan*

Sebagaimana di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa: "Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang". Mendasar pada hal tersebut maka dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak terlepas dari kebutuhan data statistik.

Terwujudnya perencanaan yang baik tentu tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola data dan informasi. Penguatan data yang akurat dan akuntabel akan membawa pengaruh bagi kualitas perencanaan. Pemanfaatan data statistik dan informasi menjadi hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data/informasi akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan akan data ini sangat berperan di dalam siklus perencanaan, yang di mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Di dalam perumusan perencanaan daerah data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukkan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini.



**Gambar 3.2 Peran data dalam Siklus Perencanaan**

Berkaitan dengan kebutuhan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka hal ini telah diamanatkan dalam Pernyataan tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang di dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan di hitung dengan formulasi jumlah publikasi data

di bagi dengan jumlah publikasi data yang di butuhkan (di mana data yang di butuhkan ini meliputi data strategis daerah, analisis indakor ekonomi, analisis inikator sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis Ketimpangan Wilayah). Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakannya melalui Program Pengembangan data/ informasi dengan output kegiatan yaitu Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dari sisi statistik sektoral, Diskominsta Kota Magelang sebagai *leading sector* dalam urusan statistik pada tahun 2017 melalui Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah telah merilis beberapa produk data diantaranya : Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia dan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi. Selain dalam bentuk buku, data-data sektoral juga *terpublish* secara on line melalui DATA GO yang merupakan Data Centre Kota Magelang dan dapat diakses melalui laman: [datago.magelangkota.go.id](http://datago.magelangkota.go.id). Data dan statistik sektoral yang tersaji berasal dari data teknis seluruh sektor yang telah tervalidasi dan terkini. Pengembangan DataGo saat ini terus di kembangkan baik fitur dan tampilannya. Tampilan DataGo saat ini dikembangkan dalam sajian data keluarahan dengan interactive mapping stat Planet.

Saat ini DataGo juga bisa di akses via twitter melalui alamat <http://twitter.com/datagodatago/status/955276292936499200>

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai leading sector perencanaan pembangunan pada tahun 2017 melalui Program Pengembangan data/informasi telah merilis Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab X pasal 274. Data/informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah seluruhnya (100 %) dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang diimnfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2017 bila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **94,75%** dari target sebesar 60% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **157,92%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui DataGo Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 89.50% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 100%. Jenis dan data yang terpublikasi baik melalui DataGo maupun melalui SIPD, dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Capaian realisasi dari indikator ini menunjukkan tren positif. Capaian tahun 2016 yang mencapai 93,5% dan capaian tahun 2017 sebesar 94.75% harus terus ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD 2016-2021.

Data dasar yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu data dasar indikator makro, diantaranya : PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), dan sebagainya. Selain itu berupa data dasar Indikator sosial, yaitu : IPM, data kependudukan, data kemiskinan, data ketenagakerjaan, data kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan data/Informasi dan statistik sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan, maka pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Magelang melalui OPD teknis yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik melaksanakan sejumlah program dan kegiatan terkait dengan data dan statistik.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Seluruh SDM yang terlibat dalam penyediaan data mampu bekerja secara efektif dalam menyediakan dan mempublikasikan data yang akurat dan terkini agar dapat diakses secara luas. Adapun anggaran Bappeda yang di manfaatkan dalam mendukung indikator melalui Program Pengembangan data/Informasi Rp. 97.164.000,-. Anggaran ini terdiri dari dua sumber dana yaitu dari dana ABBD sebesar Rp. 59.078.000,- sedangkan sisanya dari dana Bantuan Propinsi Tahun 2017.

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat Daerah sumber data, sehingga data kurang terpelihara dengan baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah;
2. Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota;
3. Belum kuatnya payung hukum pengelolaan data;
4. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota.
5. Sebagian data belum bisa di sajikan secara *realtime* pada saat data tersebut dibutuhkan mengingat beberapa data memerlukan perhitungan, survey ataupun pengelolaan data

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pembinaan secara komprehensif bagi pengelola data pada setiap Perangkat Daerah;
2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen *DATAGO* yang mengintegrasikan seluruh data sektoral;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kota Magelang;
4. Sosialisasi tentang pentingnya data kepada stakeholder.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait dengan pengembangan dan pengelolaan data



**Gambar 3.3 Screenshot DATA GO sebagai Data Centre Kota Magelang**

## **2. Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan Pemerintah mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek di dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan menjadi sangat penting. Perlibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan proses pengawasan menjadi satu hal yang tidak bisa di pisahkan. Partisipasi masyarakat dalam proses – proses pembangunan mutlak untuk di laksanakan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang, menjalin kemitraan dalam proses pembangunan menjadi tema – tema di dalam tahun perencanaan. Dengan bermitra dengan seluruh elemen masyarakat dan swasta serta perlibatan masyarakat dalam pembangunan di harapkan menjadi modal bagi pemerintah untuk bersama – sama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu :

### **a. Prosentase Usulan Masyarakat yang di akomodir dalam APBD**

Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD mempunyai formulasi perhitungan jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Berdasarkan data yang di olah, jumlah usulan masyarakat pada tahun 2017 sebanyak **634 usulan**. Dari 634 usulan tersebut yang terakomodir di dalam APBD sebesar **445 usulan**. Apabila di prosentasekan maka jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD sebesar **70.19%**. Realisasi indikator ini melebihi dari target yang di rencanakan pada tahun 2017 yaitu sebesar 60%. Adapun capaian kinerja dari indikator ini sebesar **116.98%**



Apabila di perbandingkan dengan beberapa tahun ke belakang maka capaian Indikator Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD menunjukkan trend yang meningkat, capaian tahun 2015 adalah 52% sedangkan pada tahun 2016 realisasinya mencapai 56% atau tingkat capaiannya sebesar 101,82% dari target 55 % yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akomodatifnya pemerintah Kota Magelang atas usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat.

Beberapa media yang di manfaat Pemerintah dalam menjaring aspirasi dan usulan dari masyarakat selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ada juga melalui Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion*. Saat ini Bappeda Kota Magelang mengembangkan *e-aspirasi*, *e-Musrenbang* yang dapat di manfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perencanaan. Adanya *e-Musrenbang* selain dipergunakan untuk menampung usulan masyarakat juga menjawab alasan masyarakat yang tidak tertampung beserta dengan alasannya Hal ini dilakukan meminimalisir persepsi buruk masyarakat akibat tidak terakomodirnya usulan masyarakat di dalam APBD. Selain itu juga untuk meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (*track back*) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di masyarakat



**Gambar 3.4 Konsultasi Publik Anak dan Lansia untuk menjaring Aspirasi dan usulan dalam Penyusunan Dokumen RKPD 2019**



**Gambar 3.5 Konsultasi Publik yang di ikuti oleh OPD, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, LSM, Parpol dalam Penyusunan Dokumen RKPD 2019**



**Gambar 3.6 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2018**



*b. Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga*

Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga merupakan salah satu indikator yang mewakili sasaran strategis meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun formulasi dari indikator ini adalah forum warga yang terbentuk karena adanya persamaan kepentingan dan inisiasi warga.

Forum warga yang menjadi mitra dari OPD merupakan modal bagi Pemerintah untuk mengakomodir usulan dari masyarakat atau sebagai sarana untuk bersama – sama masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan atau mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Mitra OPD berupa forum warga ataupun forum-forum terkait akan memberikan dukungan yang positif dimulai ketika penyusunan perencanaan program kegiatan itu sendiri. Lebih dari separuh OPD telah memiliki mitra kerja, sedangkan sebagian lainnya optimis mampu tercapai pada tahun-tahun mendatang hingga tahun 2021.

Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2017 sebanyak **17 OPD**. Apabila di prosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **58.62%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target yang di rencanakan pada tahun 2017 yaitu sebesar 58.62% dengan kata lain mencapai target yang telah di tetapkan di awal perencanaan tahun 2017 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100%**

Apabila di dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 dan 2015, maka capaian dari indikator ini menunjukkan *trend* yang positif. Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% dari target 2016 sebesar 51,72%. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan ini dimaksudkan agar bagaimana pemerintah dapat dan mampu mendorong dan memberdayakan masyarakat agar saling membantu sehingga masyarakat, kelompok masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam membangun semakin nampak eksistensinya.

Capaian sasaran tersebut dapat terealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.



Tabel di bawah ini merupakan tabel forum – forum warga yang bermitra dengan OPD – OPD yang ada di Kota Magelang sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah  
Pemerintah Kota Magelang**

NO	OPD	MITRA KERJA
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dewan Kesenian Kota
2	Dinas Kesehatan	Kader Posyandu
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gapeksi
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kader Trantip
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	FKUB, FPBI, FKDM
8	Dinas Sosial	Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, taruna Siaga Bencana, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
9	Dinas Tenaga Kerja	SPSI
10	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat penggerak kampung organik dan bank sampah
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Forum LPM, Forum LKM, Forum LKK, UP2KPKK, Obama, Forum Anak, Poktan
13	Dinas Perhubungan	Organda dan PO2
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	Kelompok Informasi Masyarakat
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	Dewan Kesenian Kota
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Masyarakat Pecinta Buku, Ulat Buku
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	Cat lover, Gapoktan
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Forum Mega Tidar
20	Sekretariat Daerah	
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
22	Kecamatan Magelang Selatan	
23	Kecamatan Magelang Tengah	
24	Kecamatan Magelang Utara	

NO	OPD	MITRA KERJA
25	Inspektorat	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Magelang Kota Toea,
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Forum Jarlitbangrap iptek (Jarlitbang, Dewan Riset Daerah (DRD) dan Forum Alumni Karya Siswa

Terkait dengan indikator sasaran Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga, terdapat beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan mitra. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan yang mengharapakan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan yang di mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan dan pengawasan
3. Masih terdapatnya patologi sosial atas keberadaan mitra, dimana persepsi bahwa keberadaan mitra atau kelompok masyarakat yang masih berorientasi mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah
4. Belum optimalnya saluran saluran berbasis teknologi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Bappeda khususnya senantiasa melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan tehnologi dan informasi untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, di antaranya dengan menggunakan aplikasi *e- Musrenbang* dan *e-Aspirasi*

**Solusi** yang dapat dilakukan diantaranya:

1. OPD harus semakin intens menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan mitra melalui forum warga.
2. Upaya sosialisasi penggunaan saluran saluran aspirasi masyarakat berbasis teknologi yang ada di Kota Magelang

3. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan forum forum warga dan terus memberikan pendidikan tentang pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah

Kondisi terkait dengan kemitraan di antaranya adalah belum optimalnya pemberdayaan forum warga sebagai mitra dari OPD, sehingga ke depan perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan peran serta warga melalui forum warga dan peningkatan pemberdayaan forum warga ini dalam pembangunan di antaranya : a).Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan; b). Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada; c). Peningkatan akses terhadap aspirasi masyarakat lewat berbagai media; d). Pemberdayaan Forum Mitra OPD melalui berbagai skenario program kegiatan.

### **3. Sasaran Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Sasaran strategis mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat dan daerah yang *ending*-nya adalah kesejahteraan masyarakat

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi.Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan capaian baik sasaran dan program, selain intensitas *core business* yang dilakukan juga merupakan hasil dari berbagai inovasi proses perencanaan sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut :

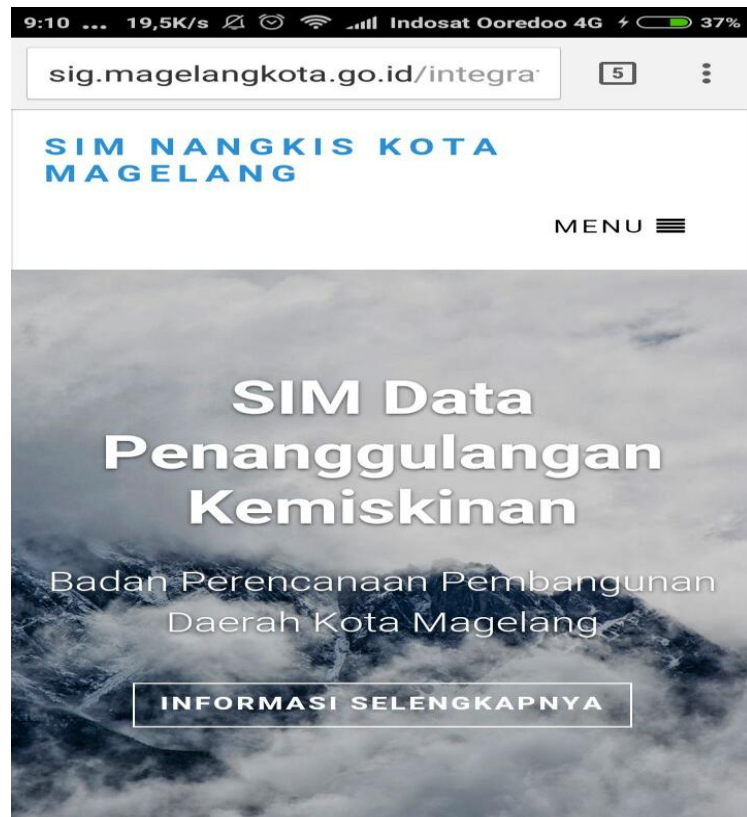
**Tabel 3.3 Inovasi Proses Perencanaan**

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
1.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra yang masih belum terintegrasi dan belum mengalir	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran dan kehandalan prosesnya
2.	<i>E-Musrenbang</i>	Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran ( <i>track back</i> ) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di masyarakat
3.	Optimalisasi <i>E_Aspiration</i> pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,
4.	Pemanfaatan Media Sosial (WhatsApps) dalam Koordinasi Penyusunan RKPD		Akselerasi proses penyusunan dan keterbukaan diskusi atas penyusunan RKPD
5.	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanaan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada core business perencanaan di setiap OPD
6.	Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Rancangan Renja OPD	Harus ada upaya agar terdapat standar belanja pada anggaran berbasis kinerja secara lebih ilmiah	Peningkatan kualitas pada substansi matriks rancangan Renja OPD
7.	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan 2018	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dgn indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan Musrenbang
8.	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang diluar jalur tema pembangunan tahun rencana, shg menghasilkan <i>planning scrap</i> pada saat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
9.	Integrasi Sistem Perencanaan dengan Penganggaran (SIPPD-SIMDA)	Inefisiensi atas implementasi sistem dalam hal waktu input atas fungsi perencanaan dan penganggaran	Tidak terjadi duplikasi atas input yang sama dalam penyusunan Renja OPD pada sistem SIPPD (Program, kegiatan, indikator) dan SIMDA
10.	Integrasi dan pemanfaatan Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Kelurahan dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut di kembangkan sebagai dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP) serta sinergisitas data KOTAKU dalam usulan Musrenbang sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target Nasional 100-0-100	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan berdasarkan pada dokumen yang disusun secara ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.
11.	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit atas solusi isu strategis dan permasalahan pembangunan
12.	Segmentasi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPd (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas

Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang dengan memanfaatkan teknologi dan informasi adalah terkait dengan data kemiskinan yang mempergunakan Sistem Informasi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (SIM Nangkis Kota Magelang). Simda Penanggulangan Kemiskinan ini akan menyajikan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), yang di dalamnya dapat di akses data masyarakat miskin by name by address yang ada di Kota Magelang. Data ini menjadi penting karena akan dipergunakan sebagai basic data dalam pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan maupun sebagai data dalam pemberian beberapa program bantuan baik dari Pemerintah daerah maupun dari Pemerintah Pusat.



**Gambar 3.7**  
Screenshot *SIM Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang*

Home / Data  
/ Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu [PBDT] - Klasifikasi 1

Tampilkan Data Kelurahan:

KEMIRIREJO

Tampilkan Tampilkan Seluruh Data

entries

	Nama Peserta	Alamat	Kelurahan	SHD
101	IWAN AGUS SANTOSA	GG LANGGAR RW RW 02 RT 06	KEMIRIREJO	KEP. RUM TAN
104	NITI PRAYOGO	JL PAJANG RW RW 01 RT 01	KEMIRIREJO	KEP. RUM TAN
104	SUPADI	SEMPLOK RW RW 01	KEMIRIREJO	KEP. RUM

**Gambar 3.8**  
ScreenShoot tampilan *SIM Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang*

Sasaran strategis ini mempunyai satu indikator kinerja yang di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator Cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari % usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Capaian Indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif  
Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD	60%	<b>72.08%</b> (457/634 x 100%)	120.13%
	Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD	65%	<b>70.22%</b> (125/178 x 100%)	108.03%
	Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD	65%	<b>67.31%</b> (35/52 x 100%)	103.55%
	Persentase usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD	15%	<b>23.08%</b> (3/13 x 100%)	153.87%
	<b>Capaian Indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif</b>	<b>51.25%</b>	<b>58.17%</b>	<b>113.50%</b>

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **51.25%** pada tahun 2017, realisasi indikator kinerjanya sebesar **58.17%**, melebihi dari target yang di rencanakan. Adapun capaian kinerja indikator ini sebesar **113.50%**



Capaian dari indikator – indikator komposit tersebut menunjukkan semakin berkualitasnya perencanaan yang di susun dengan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang meningkat sehingga upaya untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Gambar – gambar di bawah ini merupakan dokumentasi upaya Pemerintah dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif sebagai berikut :



**Gambar 3.9 Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD 2018**





**Gambar 3.10**  
**Pelaksanaan FGD 100-0-100**



**Gambar 3.11**  
**Pelaksanaan FGD SDGs**



**Gambar 3.12.**  
**Pelaksanaan FGD Penanggulangan Kemiskinan**



**Gambar 3.13**  
**Pelaksanaan FGD Smart City**



**Gambar 3.14**  
**Pelaksanaan Universal Design**

#### **4. Sasaran Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan**

Undang – undang Perencanaan nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu amanah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Menilik dari hal tersebut di atas, sasaran “mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan”. Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini di digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari % tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD di tambah % tingkat keselarasan RPJMD dengan dengan Renstra PD di tambah Prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD di bagi 3.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Capaian Indikator Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Persentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD	100%	<b>100%</b> (213/213 x 100%)	100 %
	Persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	<b>100%</b> (213/213 x 100%)	100 %
	Persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	<b>100%</b> (213/213 x 100%)	100 %
	<b>Capaian Indikator Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**5. Sasaran Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas**

Perencanaan Pembangunan yang di susun dalam tiap tahun perencanaan mempunyai output kinerja berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang baik merupakan dokumen perencanaan yang sesuai dan menjawab isu dan permasalahan yang ada dalam pembangunan. Dokumen perencanaan yang baik selain berupa dokumen perencanaan yang berkualitas juga merupakan dokumen yang dapat di implementasikan oleh OPD teknis serta menjadi *guide* dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan OPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Menilik dari hal tersebut di atas, sasaran " Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas" merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kualitas dari perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di gunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari % implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana di tambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Capaian Indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yg Berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	70%	<b>73.33%</b> (22/30 x 100%)	103.33 %
	Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	70%	<b>73.33%</b> (22/30 x 100%)	103.33 %
	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang fisik prasarana	70%	<b>75%</b> (15/20 x 100%)	107.14 %
	Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	70%	<b>75%</b> (15/20 x 100%)	107.14 %
	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	70%	<b>72%</b> (18/25 x 100%)	102.86 %
	Tingkat implementasi perencanaan bidang sosial budaya	70%	<b>72%</b> (18/25 x 100%)	102.86 %
	<b>Capaian Indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas</b>	<b>70%</b>	<b>73.11%</b>	<b>104.44</b>

Salah satu omitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu OPD yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan pembangunan adalah menghasilkan dokumen – dokumen perencanaan yang impilikatif dan dapat dipergunakan OPD – OPD teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan menjawab isu /permasalahan yang di hadapi daerah. Capaian tahun 2017 untuk indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas melebihi target yang di rencanakan. Pada tahun 2017 direncanakan target kinerja sebesar 70% adapun capaiannya sebesar 73.11% sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar 104.44%

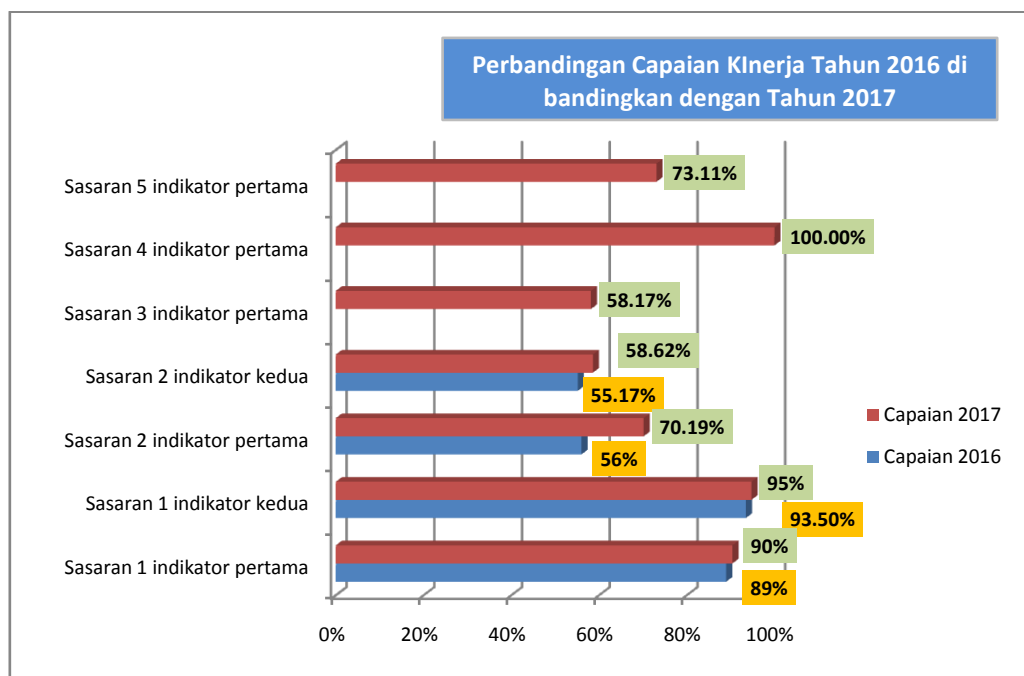
Untuk mengetahui perbandingan antara capaian indikator kinerja pada tahun 2017 sebagai tahun kedua perencanaan pada Renstra OPD dengan tahun pertama perencanaan pada tahun 2016 , tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan tersebut :

**Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017  
dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
			2016	2017	%
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	b. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89%	90.41%	101.58%
		c. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	93.5%	94.75%	101.34%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	56%	70.19%	125.34%
		c. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	55.17%	58.62%	106.25%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	na	58.17%	58.17%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
			2016	2017	%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	na	100%	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	na	73.11%	73.11%

Berdasarkan capaian kinerja pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 melebihi target yang di targetkan pada tahun 2017 dan apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2016 di mana tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi perencanaan maka dapat kita lihat bahwa capaian pada tahun 2017 jauh melebihi capaian kinerja pada tahun dasar 2016.



**Gambar 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016**



Capaian sasaran tersebut dapat terrealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu untuk pencapaian sasaran – sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui beberapa program antara lain :

1. **Program perencanaan pembangunan daerah.**

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator Tingkat konsistensi Penjabaran program RPJMD ke RKPD; Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir; Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui Musrenbang, Konsultasi Publik , *Focus Group Discussion*, serta melalui *E-Aspiration* dan *E-Musrenbang* sebagai inovasi proses perencanaan.

Keberhasilan dari program ini di tentukan oleh keberhasilan dari indikator dari program ini ada 5 yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator ini menggambarkan konsistensi antara jumlah program yang terkaomodir ke dalam RKPD. Dari total 213 program dalam RPJMD 2016-2021 keseluruhannya telah masuk ke dalam RKPD dengan kata lain dari target 100% tercapai 100 %. Ke depan kinerja ini agar dapat di pertahankan dengan baik.

b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir

Sebagaimana amanat Permendagri 54 Tahun 2010, pokok pikiran Dewan wajib dihadirkan sebagai bagian dari proses politik penyusunan RKPD. Dokumen ini akan diselaraskan ke dalam Rancangan RKPD hingga penetapannya. Dengan substansi yang memberikan ruang bagi Dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat, maka akomodasi atas pokok pikiran dewan menjadi bersifat mengikat, tentu saja setelah dilakukan penelaahaan atau verifikasi oleh OPD. Pada Tahun 2017 target akomodasi pokok pikiran dewan adalah 70% dan terakomodir sejumlah 70.22%. Dari total pokok pikiran sebanyak 190 pokok pikiran, 125 diakomodir setelah ditelaah dan diverifikasi.

c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir

Dengan definisi operasional Jumlah Kesepakatan Musrenbang yang diakomodir/Jumlah Kesepakatan, indikator ini pada tahun 2017 tercapai 72.08% dari target pada tahun tersebut sebesar 72%, artinya tingkat capaian indikator kinerja persentase BA Musrenbang yang terakomodir adalah 100.11%.

d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Sebagai media menjangkau aspirasi masyarakat, peran konsultasi publik menjadi sangat strategis, terutama dalam menyempurnakan rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2018. Dari 3 segmen yaitu segmen kelompok Umum, segmen Lansia dan segmen Anak sekolah, konsultasi publik ini menghasilkan banyak sekali usulan yang layak dan sesuai dengan tema perencanaan sehingga mewarnai renja SKPD yang terlibat. Dari target sebesar 35% dapat tercapai 36% atau kinerja mencapai 102.86%

e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Indikator ini diformulasikan dengan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat. Pada tahun 2017 usulan masyarakat yang terakomodir sekitar 71.15% dari target sebanyak 76%. Apabila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan realisasi capaian, dimana pada tahun 2016 capaiannya sebesar 75%. Namun apabila di lihat dari partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini cukup menggembirakan mengingat bahwa penting bagi masyarakat terkait sumbang saran aspirasinya diakomodir untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah.

## ***2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.***

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan. Upaya yang dilakukan antara lain Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menghadirkan Tenaga Ahli dan Nara Sumber dengan sasaran para Kasubbag Program, Pejabat Eselon III dan II maupun Personil Bappeda sendiri.

Indikator dari program ini ada 3 yaitu sebagai berikut :

- *Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan*

Pada tahun 2017 indikator aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan untuk S1 tidak mencapai target yang ditentukan . Dari target 47% telah mampu terrealisasi sebesar 43.24% dengan jumlah pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 16. Namun demikian untuk segmen S2 mencapai 37.84% dari target 34%. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 lebih



tinggi daripada capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 33.33% hal ini disebabkan karena sebagian personil yang sedang menempuh S2 akan selesai masa tugas belajarnya. Tahun depan persentase personil S1 akan semakin berkurang karena beberapa personil yang sedang menempuh S2 akan selesai masa tugas belajarnya. Fenomena ini cukup baik untuk peningkatan kapasitas aparatur perencanaan.

- *Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran*

Pada tahun 2017 sejumlah 34 orang dari 37 personil Bappeda mengikuti pelatihan ini. Artinya target sebesar 87% telah tercapai sebanyak 91.89% rasio pegawai yang mengikuti pelatihan ini. Beberapa pegawai tidak dapat mengikuti karena ada yang sedang cuti maupun sedang tugas belajar. Peningkatan kapasitas pegawai Bappeda tidak hanya terbatas pada yang di ikutkan pada pelatihan Perencanaan yang di laksanakan oleh Bappeda tapi melalui anggaran Bappeda atau anggaran dari Badan Kepegawaian kita mengirimkan personil untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat maupun bintek untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan personil perencanaan

- *Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda*

Pelaksanaan workshop Bappeda pada tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang di rencanakan sehingga diharapkan akan mampu mengangkat kinerja dan kemampuan aparat perencanaan bappeda untuk menopang *core business* perencanaan





**Gambar 3.16 Pelaksanaan Workshop Perencanaan Pembangunan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana**

**3. *Perencanaan pembangunan bidang ekonomi.***

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi.

**4. *Perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya.***

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Sosial Budaya.

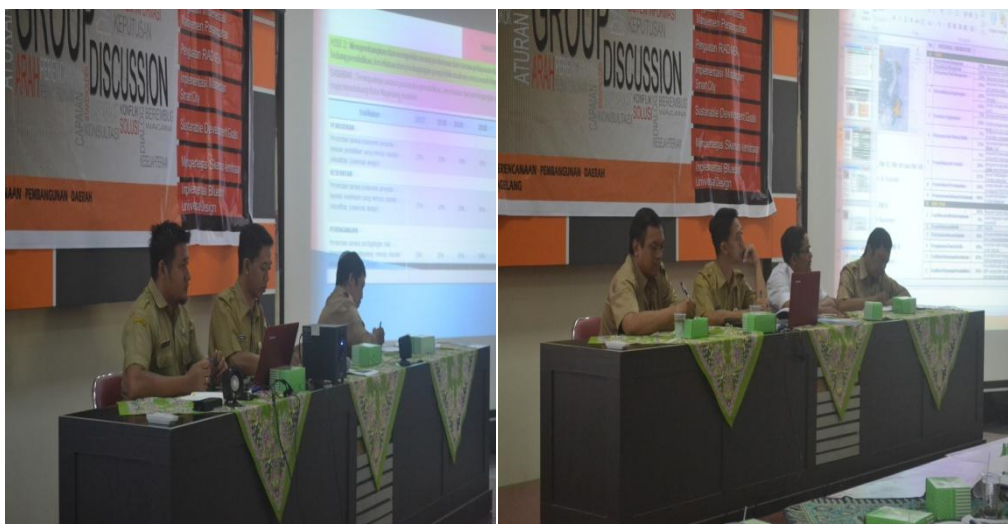


**Gambar 3.17 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Kegiatan Expose Penanggulangan Kemiskinan**

### **5. Perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana.**

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana wilayah. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Fisik Prasarana.

Sebagai perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja perencanaan di segala aspek mutlak diperlukan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial Budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi, prasarana dan sosial Budaya dalam case Bappeda Magelang seluruh kegiatan ini sudah dilakukan dan capaian mencapai masing masing 100%.



**Gambar 3.18 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Universal Design dan Kegiatan Monev Program 100-0-100**

### **6. Pengembangan Data/Informasi**

Indikator dari program ini adalah Persentase terpenuhi-nya jenis data yang dirilis/ Jumlah data yang dibutuhkan . Indikator ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD/Profil). Dari target sebesar 85% terlaksana sebesar 100 % mengingat data data yang telah diatur dalam SIPD dapat terisi dan terakomodir dengan baik. Tinggal bagaimana pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan Kota.



## 7. Kerjasama Pembangunan

Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindak-lanjuti. Indikator dari program ini adalah Indikator ini menandakan bahwa hasil kegiatan FEDEP menghasilkan kerjasama antar stakeholders yang ditindaklanjuti.



**Gambar 3.19 Pelaksanaan Kegiatan FEDEP berupa Pelatihan UMKM bersama “Sadewa Mart” dan Kegiatan Pameran UMKM di Paragon Hotel**

Program Kerjasama Pembangunan yang dilaksanakan Bappeda Kota Magelang merupakan Kegiatan FEDEP dengan indikator kinerjanya adalah jumlah MOU. Capaian pada tahun 2017 terdapat 2 kerjasama dari 2 kerjasama yang dihasilkan. Artinya Tingkat capaian indikator ini mencapai 100%.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, di capai melalui beberapa program. Adapun untuk melihat keberhasilan dari capaian kinerja program dapat dilihat dari capaian indikator programnya. Indikator kinerja program yang mendukung sasaran strategis sebagaimana tersaji di dalam Renstra OPD, sebagaimana di tampilkan di dalam tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.8**  
**Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap**  
**Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017**

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja RKPd Th.2017	Status Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	100	100%	100%	100%	●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	70%	70,22%	100,31%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja RKPd Th.2017	Status Capaian
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	72	72,08%	100,11%	●
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	35	36%	102,86%	●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	71,145%	93,61%	▶
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100	100	100	100%	●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100	100	100	100%	●
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100	100	100	100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	2	2	100%	●
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95	90	92	102,22%	●
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100	100	100	100%	●

Secara garis besar dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.

2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya :

1. Melakukan koordinasi intensif dengan legislatif dan Setwan agar penyampaian Pokok pikiran dewan dapat terkawal sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi mampu terjaga secara memuaskan.
3. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
4. Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
5. Peningkatan kapasitas core business perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.

### **3.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran Tahun 2017**

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2017 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh 11 Program dan 69 Kegiatan.

Program yang masuk di dalam urusan ini selain Program-program yang masuk dalam urusan perencanaan pembangunan juga termasuk di dalamnya program pendukung /program kegiatan yang ada dan di laksanakan di tiap OPD (seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan).

Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2017 yang di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut:

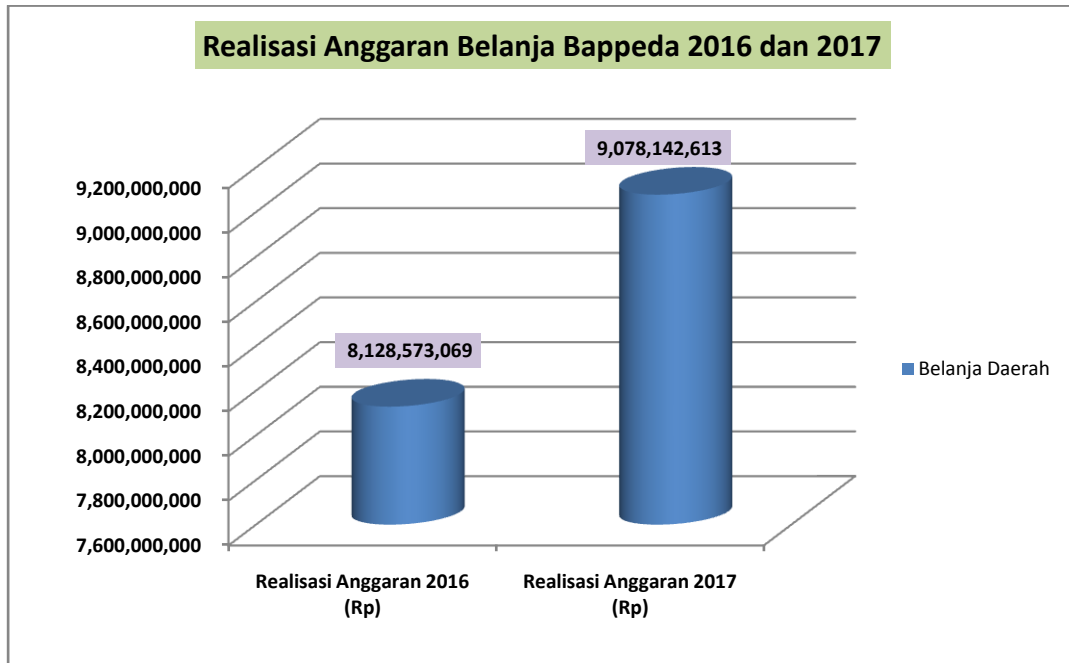
**Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Belanja Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 dan 2017**

Belanja Daerah	Realisasi Anggaran 2016 (Rp)	( %) serapan anggaran	Realisasi Anggaran 2017 (Rp)	( %) serapan anggaran
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.128.573.069,-</b>	<b>91.32%</b>	<b>9.078.142.613,-</b>	<b>89.17%</b>
<b>1, Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.186.847.368,-</b>	<b>92.25%</b>	<b>2.848.310.903,-</b>	<b>86.39%</b>
Belanja Pegawai	2.186.847.368,-	92.25%	2.848.310.903,-	86.39%
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>5.941.725.701,-</b>	<b>90.99%</b>	<b>6.229.831.710,-</b>	<b>90.51%</b>
Belanja Pegawai	1.746.984.000,-	93.14%	1.739.376.000,-	94.67%
Belanja Barang dan Jasa	3.911.653.701,-	89.70%	3.821.861.710,-	90.36%
Belanja Modal	283.088.000,-	96.47%	668.594.000,-	81.92%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.128.573.069,-</b>		<b>9.078.142.613,-</b>	

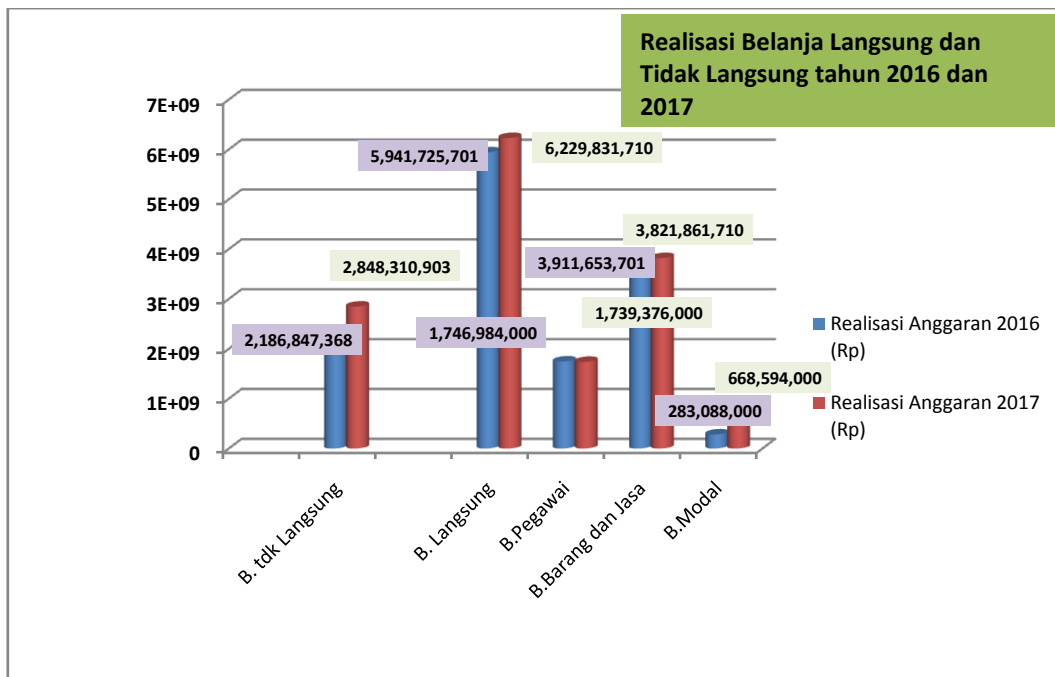
Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016, data di olah

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.180.245.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.078.142.613,- atau sebesar 89.17%. Realisasi tahun 2016 sedikit lebih rendah di bandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang sebesar 91.32%. Hal ini di sebabkan karena adanya tambahan anggaran pada Perubahan Anggaran 2017 sebesar sekitar 2 Milyar. Walaupun realisasi tahun 2017 lebih rendah namun tidak mengurangi capaian kinerja pada tahun 2017. Capaian Output (fisik) kegiatan secara keseluruhan

terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2017 sebesar 100%. Apabila di dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan . Pada tahun 2016 terdapat satu kegiatan dengan capaian realisasi fisik sebesar 75% sehingga capaian realisasi fisik kegiatan tahun 2016 yaitu sebesar **99.68%**.



**Gambar 3.20 Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**



**Gambar 3.21 Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 dan Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

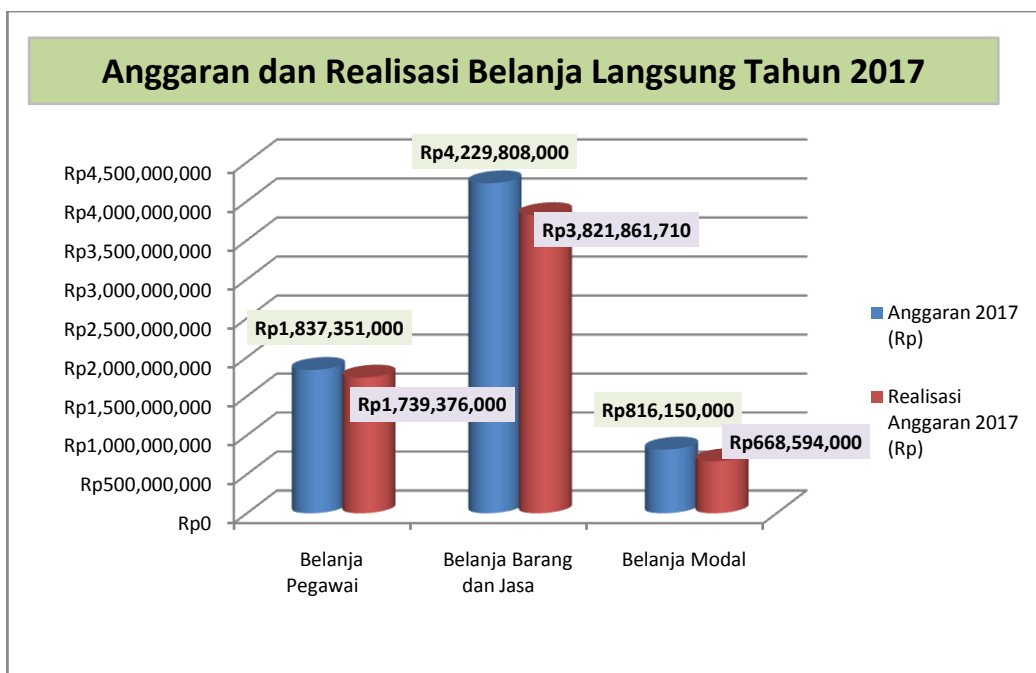


Realisasi belanja tidak langsung/belanja pegawai yang serapannya sebesar 89.17 atau sedikit lebih rendah apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang sebesar 90.93%. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- a). Adanya *acress* yang ditambahkan pada setiap komponen gaji pegawai;
- b). Adanya beberapa karyawan Bappeda yang sedang mengikuti tugas belajar namun perhitungan dari DPPKD, untuk tunjangan fungsional umum dan tunjangan tambahan penghasilan PNS masih diperhitungkan sehingga pada realisasinya menjadi SILPA

Sementara untuk Belanja langsung serapannya sebesar 90.51% selisih 0.42% apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang sebesar 91.93%. Secara keseluruhan beberapa hal yang menyebabkan realisasi serapan anggaran untuk belanja langsung sebesar 90.51% diantaranya adalah sebagai berikut:

- a). efisiensi anggaran/ penggunaan anggaran sesuai kebutuhan;
- b). adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak bisa diserap secara maksimal;
- c). *Schedule* Penetapan Perubahan APBD tahun 2017 mundur dari yang sudah direncanakan menyebabkan Perencanaan anggaran kegiatan yang telah di susun di dalam DPA Perubahan tidak bisa di cairkan sepenuhnya sehingga menjadi SILPA kegiatan (seperti kegiatan baru di perubahan untuk belanja pegawai/ honorarium kegiatannya hanya bisa di cairkan separuhnya saja);
- d). Adanya beberapa efisiensi belanja pemeliharaan seperti rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, di mana penggunaan dari anggaran tersebut tidak bisa di prediksi secara pasti penggunaan hanya di dasarkan pada realisasi anggaran pada tahun sebelumnya
- e). Realisasi belanja pengadaan baik belanja modal atau jasa pihak ke tiga yang penawarannya di bawah pagu yang telah di anggarkan pada DPA.



**Gambar 3.22 Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

Adapun SILPA Tahun 2017 **Rp. 1.102.102.387,-** atau sebesar **10.83%**. Apabila di dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, SILPA pada tahun 2017 relatif lebih besar di mana SILPA pada tahun 2016 sebesar **Rp. 772.226.931,-** atau sebesar **8.68%**. Peningkatan SILPA ini sebanding dengan adanya peningkatan anggaran sebesar 2 Milyar pada Perubahan APBD 2017. Anggaran pada tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Penetapan APBD Perubahan yang mengalami kemuduran sedikit membawa perubahan bagi serapan anggaran

**Tabel 3.10 SILPA Tahun Anggaran 2017  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

Belanja Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	SILPA 2017 (Rp)	( %) SILPA
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.180.245.000,-</b>	<b>1.102.102.387, 00</b>	<b>10.83%</b>
<b>1, Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.296.936.000,-</b>	<b>448.625.097, 00</b>	<b>13.61 %</b>
Belanja Pegawai	3.296.936.000,-	448.625.097, 00	13.61 %
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>6.883.309.000,-</b>	<b>653.447.290, 00</b>	<b>9.49%</b>
Belanja Pegawai	1.837.351.000,-	97.975.000, 00	5.33%
Belanja Barang dan Jasa	4.229.808.000,-	407.946.290, 00	9.64%
Belanja Modal	816.150.000,-	147.556.000, 00	18.08%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.180.245.000,-</b>	<b>1.102.102.387, 00</b>	

*Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Bappeda Tahun 2017, data di olah*

SILPA pada belanja tidak langsung disebabkan karena adanya akses yang ditambahkan di tiap komponen belanja gaji serta adanya beberapa karyawan Bappeda yang mengikuti Tugas Belajar sehingga anggaran belanja tidak langsung tersebut tidak bisa dicairkan secara maksimal

Adapun Rincian SILPA untuk belanja langsung sebesar 9.49%, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Beberapa alasan terkait adanya SILPA untuk belanja langsung di antaranya :

- a). belanja honorium pegawai yang tidak dapat di cairkan seluruhnya karena beberapa hal secara teknis yang menyebabkan anggaran tidak dapat di serap sepenuhnya seperti anggaran menyesuaikan dengan jumlah anggota tim yang ada di dalam SK Kegiatan atau karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan sehingga sisa anggaran belanja honorarium kegiatan yang tidak dipergunakan tidak dapat di geserkan pada perubahan APBD;
- b. Adanya SILPA pada belanja barang dan jasa, di antaranya karena adanya efisiensi anggaran yang dipergunakan sesuai kebutuhan, adanya perubahan dan percepatan penyelesaian *Schedule* kegiatan yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran atau adanya penawaran pihak ketiga atas belanja barang dan jasa yang realisasinya di bawah pagu anggaran yang direncanakan di dalam DPA;
- c. Adanya SILPA pada belanja Modal yang di sebabkan karena realisasi belanja modal di bawah pagu anggaran yang di rencanakan di dalam DPA

Hal – hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan di sesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah terkait realisasi belanja langsung yang berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Adanya penurunan realisasi serapan belanja langsung juga di subsidi dengan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran belanja langsung namun hal ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan anggaran belanja. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul pada saat Perubahan APBD sedangkan waktu ditetapkannya Perubahan APBD tersebut mengalami kemunduran waktu sehingga waktu

pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja. Hal lain yang menjadi permasalahan penyerapan belanja langsung di antaranya :

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan maupun anggaran kas bulanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada triwulan awal padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
2. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA atau anggaran kas yang sudah di inputkan ke dalam SIMDA belum sepenuhnya sesuai dengan *Schedule* kegiatan;
3. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat *gap* antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap;
4. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *Schedule* yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
5. Belum dipergunakannya secara optimal Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan – kegiatan terkait dokumen perencanaan atau kegiatan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Badan Perencanaan sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban.

Selain hal tersebut di atas perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal – hal yang direncanakan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program dan harapannya realisasi penganggaran akan mengalami trend yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun. Secara terperinci di bawah ini di sajikan tabel serapan anggaran per kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran/ Target	Realisasi	Prosentase (%)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>709,088,000</b>	<b>639,241,235</b>	<b>90.15</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	685,000	462,000	67.45
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96,600,000	66,083,036	68.41
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,590,000	7,780,200	90.57
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129,462,000	126,678,600	97.85
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65,778,000	65,627,700	99.77
6	Penyediaan alat tulis kantor	16,268,000	16,268,000	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,844,000	33,723,975	96.79
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	100.00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,720,000	6,720,000	100.00
10	Penyediaan bahan logistik kantor	1,450,000	1,441,500	99.41
11	Penyediaan makanan dan minuman	31,746,000	31,548,500	99.38
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245,900,000	217,675,304	88.52
13	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	66,045,000	60,232,420	91.20
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1,362,161,000</b>	<b>1,175,709,718</b>	<b>86.31</b>
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	613,400,000	468,704,000	76.41
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	82,350,000	80,550,000	97.81
16	Pengadaan mebeleur	90,400,000	89,450,000	98.95
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	315,950,000	306,738,000	97.08
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166,620,000	154,110,668	92.49
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17,176,000	11,924,050	69.42

No	Program/ Kegiatan	Anggaran/ Target	Realisasi	Prosentase (%)
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71,265,000	59,692,000	83.76
21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000	4,541,000	90.82
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>	<b>202,292,000</b>	<b>182,960,351</b>	<b>90.44</b>
22	Workshop perencanaan pembangunan daerah	78,042,000	64,160,500	82.21
23	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	124,250,000	118,799,851	95.61
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>75,201,000</b>	<b>67,115,300</b>	<b>89.25</b>
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15,512,000	13,977,400	90.11
25	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,550,000	8,335,000	97.49
26	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9,165,000	9,139,000	99.72
27	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11,122,000	9,164,400	82.40
28	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17,593,000	16,298,500	92.64
29	Penyusunan Rencana Strategis OPD	7,404,000	5,657,000	76.40
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5,855,000	4,544,000	77.61
	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>97,164,000</b>	<b>91,517,900</b>	<b>94.19</b>
31	Penyusunan Profile Daerah	97,164,000	91,517,900	94.19
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>226,313,000</b>	<b>220,794,350</b>	<b>97.56</b>
32	Fasilitasi FEDEP	226,313,000	220,794,350	97.56
	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>14,160,000</b>	<b>14,160,000</b>	<b>100.00</b>
33	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	14,160,000	14,160,000	100.00
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1,609,319,000</b>	<b>1,456,917,076</b>	<b>90.53</b>
34	Penyusunan rancangan RKPD	302,504,000	282,645,000	93.44



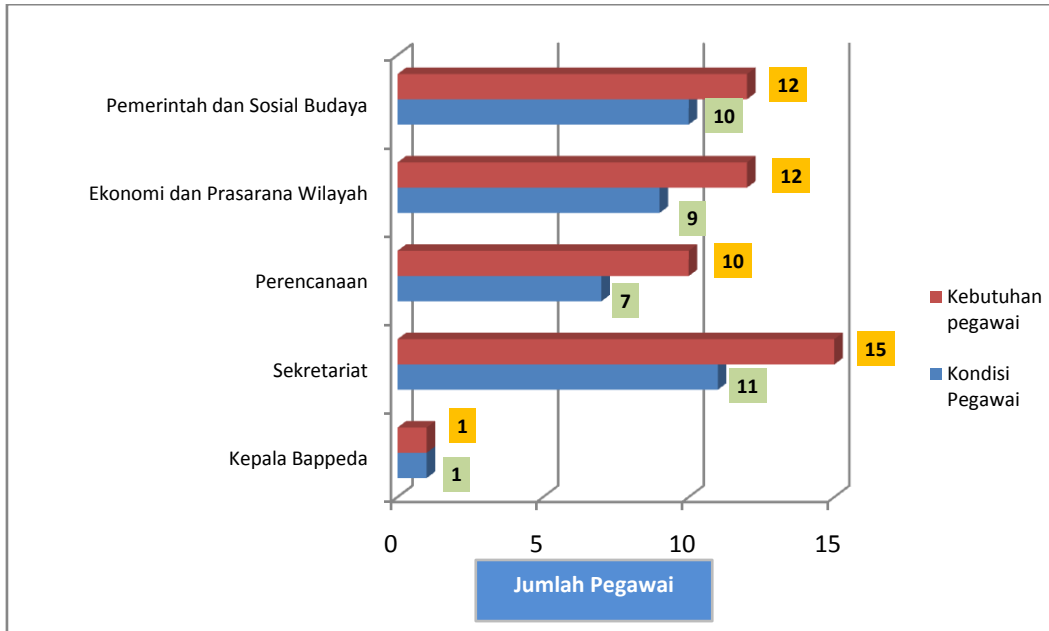
No	Program/ Kegiatan	Anggaran/ Target	Realisasi	Prosentase (%)
35	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	136,500,000	125,286,000	91.78
36	Penetapan RKPD	34,855,000	30,065,000	86.26
37	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	17,671,000	15,669,000	88.67
38	Forum OPD dan FGD	139,620,000	118,134,775	84.61
39	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	50,500,000	46,383,200	91.85
40	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	96,120,000	86,361,000	89.85
41	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	128,595,000	105,806,000	82.28
42	Penetapan Perubahan RKPD	29,305,000	27,758,000	94.72
43	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	92,579,000	85,346,000	92.19
44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	149,753,000	143,952,700	96.13
45	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	46,625,000	43,059,500	92.35
46	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	132,618,000	111,008,086	83.71
47	Penyusunan Standar Satuan Harga	156,875,000	149,590,000	95.36
48	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	95,199,000	85,852,815	90.18
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>642,691,000</b>	<b>604,074,653</b>	<b>93.99</b>
49	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	150,300,000	146,045,500	97.17
50	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV	153,405,000	149,747,000	97.62
51	Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	99,755,000	98,440,000	98.68
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dalam Skema E-Commerce	118,365,000	112,840,500	95.33
53	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	120,866,000	97,001,653	80.26

No	Program/ Kegiatan	Anggaran/ Target	Realisasi	Prosentase (%)
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>	<b>907,466,000</b>	<b>821,082,635</b>	<b>90.48</b>
54	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	155,035,000	141,194,850	91.07
55	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	103,986,000	90,648,000	87.17
56	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	100,718,000	85,777,800	85.17
57	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	192,739,000	177,314,500	92.00
58	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	110,856,000	98,915,500	89.23
59	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	102,705,000	97,481,800	94.91
60	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	30,984,000	26,219,185	84.62
61	Penyusunan Dokumen Kemitraan	110,443,000	103,531,000	93.74
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana</b>	<b>1,037,454,000</b>	<b>956,258,492</b>	<b>92.17</b>
62	Penyusunan Blueprint Universal Design	185,000,000	182,340,000	98.56
63	Review Strategi Sanitasi Kota	241,122,000	219,481,992	91.03
64	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	68,895,000	61,862,500	89.79
65	Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theatre	139,900,000	133,880,500	95.70
66	Pembaruan Data Dasar Usulan Keciaptakaryaan	96,897,000	93,020,500	96.00
67	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk	105,420,000	87,683,000	83.17
68	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk	107,120,000	88,485,000	82.60
69	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST 3R Induk	93,100,000	89,505,000	96.14
		<b>13,057,530,000</b>	<b>11,820,422,185</b>	<b>90.53</b>

Sumber : Laporan LKPJ Tahun 2017 Bappeda, data di olah

## ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya khususnya terkait dengan sumber daya aparatur dapat di lihat dari perbandingan kebutuhan karyawan pada Bappeda Kota Magelang dengan kondisi karyawan pada saat ini. Capaian tersebut dapat di lihat pada grafik di bawah ini sebagai berikut :



**Gambar 3.21 Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja**

Terkait dengan sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12 Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017**

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	<b>Total Aset Intrakompatibel</b>	
	a. Aset Intrakompatibel	Rp. 5.655.160.139, 66
	b. Aset Lainnya Intrakompatibel	Rp. 1.397.291.933, 34
2	<b>Aset Ekstrakompatabel</b>	
	a. Aset Ekstakompatibel	Rp. 101.751.850, 00
	b. Aset Lainnya Ekstrakompatibel	Rp. 3.991.300, 00

*Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2017*

Di bawah ini di sajikan data asset intrakompatibel yang terdiri dari asset – asset Bappeda yang tercatat di dalam Neraca dan Laporan Keuangan, di mana angka dari asset tersebut di atas nilai kapitalisasi dari suatu asset yang dikelola oleh daerah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Daftar Realsiasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017**

NO	URAIAN	TAHUN 2016	Tahun 2017				SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		
			BM	REKLASIFIKASI	REKLASIFIKASI	SK SEKDA	
1	Tanah	-					-
2	Alat Berat	3,351,000.00	329,483,000.00	-	129,883,000.00	-	202,951,000.00
3	Alat Angkutan	904,648,830.00	-	-	-	-	904,648,830.00
4	Alat Bengkel	-					-
5	Alat Pertanian dan Peternakan	-					-
6	Alat Kantor dan RT	1,953,516,010.66	300,845,000.00	5,862,000.00	12,336,000.00	-	2,247,887,010.66
7	Alat Studio dan Kom	2,658,000.00	5,080,000.00	-	-	-	7,738,000.00
8	Alat Ukur	12,380,000.00					12,380,000.00
9	Alat Kedokteran	8,205,129.00					8,205,129.00
10	Alat Laboratorium	-					-
11	Alat Keamanan	9,682,860.00	3,296,000.00				12,978,860.00
12	Bangunan Gedung	2,114,520,900.00	-	129,883,000.00	-	-	2,244,403,900.00
13	Bangunan Monumen	-					-
14	Jalan dan Jembatan	-					-
15	Bangunan Air (irigasi)	5,842,860.00					5,842,860.00
16	Instalasi	-					-
17	Jaringan	-					-
18	Buku Perpustakaan	4,649,550.00	-	-	-	-	4,649,550.00
19	Barang Bercorak Kebudayaan	3,475,000.00					3,475,000.00
20	Hewan/ternak, Tanaman dan Taman	-					-
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	-					-
	Jumlah	5,022,930,139.66	638,704,000.00	135,745,000.00	142,219,000.00	-	5,655,160,139.66

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda tahun 2017

## **PENCAPAIAN KINERJA**

Secara substantif Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2017 yang terepresentasikan melalui capaian kinerja dari program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran – sasaran strategis, dapat di lihat pada tabel 3.14 di bawah ini

**ADA DI EXCEL**